

# KRITIK SOSIAL DALAM KUMPULAN PUISI *NEGERI TERLUKA* KARYA SAUT SITUMORANG

Renny Mey Adiyanti<sup>1</sup>, Ma'mur Saadie<sup>2</sup>, Dheka Dwi Agustiningih<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

rennymeyadiyanti@upi.edu<sup>1</sup>, mamursaadie@gmail.com<sup>2</sup>, agustiningih.dhekadwi@upi.edu<sup>3</sup>

## Abstrak

Permasalahan sosial tidak dapat kita hindari. Permasalahan tersebut dapat berupa berbagai masalah di berbagai lini kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, kejahatan, atau kesehatan. Permasalahan tersebut memunculkan kritik di masyarakat. Permasalahan mendasar lain adalah ketidaksesuaian antara harapan dan realitas cenderung memunculkan kritik di dalam masyarakat. Berbagai masalah di Indonesia dapat disampaikan melalui berbagai media. Salah satu media yang dapat digunakan adalah karya sastra. Hal tersebut disebabkan karya sastra lahir dari keadaan sosial budaya sehingga menjadi cerminan keadaan sosial yang sebenarnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang yang mengandung unsur kritik sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kritik sosial yang terkandung dalam kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah delapan puisi pada kumpulan puisi *Negeri Terluka*, yaitu (1) "potret Kota Medan"; (2) "banyak orang menebang hutan"; (3) "HARTO"; (4) "aku adalah mayat"; (5) "PERINGATAN RAKYAT"; (6) "Negeri Terluka"; (7) "Matamu"; dan (8) "Apakah Kita Harus Diam Saja?!". Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah dianalisis, kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang ditemukan kritik sosial berupa kritik sosial masalah lingkungan hidup, masalah birokrasi, masalah kependudukan, masalah pelanggaran norma-norma masyarakat, masalah kejahatan, dan masalah kemiskinan.

**Kata kunci:** kritik sosial, kumpulan puisi, Saut Situmorang, Negeri Terluka

## PENDAHULUAN

Sebagaimana yang sudah sering didengar bahwa sastra lahir dari keadaan sosial budaya. Artinya, sastra merupakan cerminan keadaan yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan keadaan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sastra bersifat reflektif dan interaktif sebagaimana yang dijelaskan oleh Harsanti (2017, hlm. 625). Bahkan, sastra dapat menjadi semangat untuk melaksanakan perubahan masyarakat, kebangkitan suatu bangsa, penguatan rasa cinta tanah air, juga sumber inspirasi dan motivasi kekuatan untuk perubahan sosial budaya sehingga sastra bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga pencerahan mental (Harsanti, 2017, hlm. 625). Hal ini sesuai dengan fungsi sastra sebagai *dulce et utile*, yaitu mendidik dan menghibur.

Tarigan (1984, hlm. 4) menyampaikan bahwa puisi merupakan salah satu genre sastra yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *poesis* berarti penciptaan. Menurut Pradopo (2018, hlm. 7) puisi adalah suatu karya sastra yang mengekspresikan pemikiran sehingga membangkitkan perasaan. Perasaan tersebut merangsang imajinasi pancaindra dalam susunan yang berirama. Lebih lanjut, Pradopo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya estetis yang bermakna. Bermakna artinya bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna (2009, hlm. 3). Puisi memiliki keistimewaan dibandingkan dengan jenis sastra lain karena banyaknya interpretasi dan penafsiran yang ditimbulkan. Puisi juga menyimpan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Endraswara (2012, hlm. 41) bahwa puisi sering membungkus realitas sosial. Dengan demikian, puisi dapat berisi berbagai masalah yang terjadi sehingga menimbulkan kritik sosial. Menurut Nurgiyantoro (1995, hlm. 331) sastra yang berisi kritik menggambarkan bahwa terjadi hal yang tidak baik atau menyimpang dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengarang hadir sebagai pembawa pesan hasil dari pengamatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pradopo (2018, hlm. 7) bahwa karya sastra, khususnya puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting.

Pengalaman tersebut digubah dalam wujud yang paling berkesan. Hal itu yang dilakukan oleh Saut Situmorang. Saut Situmorang merupakan seorang sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara. Sastrawan yang aktif menulis puisi, cerita pendek, dan esai. Selain itu, Saut juga dikenal sebagai editor dan kurator sastra. Saut dikenal sebagai sastrawan yang lantang dan berani. Lewat karyanya, beliau mengkritik keadaan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Salah satunya dalam buku kumpulan puisi yang berjudul *Negeri Terluka*. Dalam buku *Negeri Terluka* terdapat 41 puisi yang Saut tulis sejak puluhan tahun lalu. Hal tersebut yang menjadikan kumpulan puisi tersebut istimewa karena merangkum kejadian atau peristiwa di masa lalu yang mungkin sudah banyak dilupakan. Rekaman kejadian yang berkaitan dengan keadaan sosial disampaikan oleh Saut Situmorang melalui puisi-puisi dalam kumpulan puisi tersebut. Salah satu puisi yang terdapat dalam buku tersebut berjudul "Negeri Terluka" sebagaimana judul buku. Penggalan puisi tersebut menceritakan keadaan Indonesia. Melalui lirik-lirik puisi tersebut, Saut menggambarkan bahwa banyak rakyat Indonesia kelaparan di negaranya

sendiri yang subur makmur, tetapi hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu. Dengan demikian, puisi tersebut mengungkapkan kritik sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa karya sastra digunakan sebagai media menyampaikan kritik sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahayu (2017, hlm. 24) bahwa kritik sosial dapat disembunyikan dalam sebuah karya sastra.

Kritik sosial dibentuk oleh dua kata, yaitu *kritik* dan *sosial*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *kritik* berarti kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sementara itu, *sosial* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian, dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial adalah kecaman atau tanggapan terhadap sesuatu hal yang terjadi di masyarakat. Suatu hal tersebut merupakan hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan keadaan seharusnya.

Menurut Abrar (1997, hlm. 44) kritik sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat. Tujuan kritik sosial adalah sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Lebih lanjut, Akbar menganggap kritik sosial adalah variabel dalam kontrol sosial. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial dalam karya sastra adalah usaha pengarang mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan disertai berbagai pertimbangan. Soekanto (2015, hlm. 319—343) membagi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat secara umum menjadi sembilan, yaitu (1) kemiskinan, (2) kejahatan, (3) disorganisasi keluarga, (4) masalah generasi muda dalam masyarakat modern, (5) peperangan, (6) pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, (7) masalah kependudukan, (8) masalah lingkungan hidup, dan (9) birokrasi.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengungkap kritik sosial dalam puisi adalah menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra dibentuk oleh dua ilmu interdisipliner, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu sastra. Sosiologi tidak dapat terpisah dari fenomena yang ada di masyarakat karena sosiologi merupakan ilmu yang membahas masyarakat. Kaitannya dengan sastra, sosiologi dan sastra memiliki hubungan yang kuat karena sosiologi yang lahir untuk mengkaji fenomena yang ada di masyarakat, lalu fenomena masyarakat tersebut pula melahirkan karya sastra. Dengan demikian, perantara antara sosiologi dan karya sastra adalah pengarang itu sendiri yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut jenisnya, sosiologi sastra dibagi menjadi tiga, yaitu (1) sosiologi pengarang; (2) sosiologi karya sastra; dan (3) sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra (Wellek dan Warren, 2016, hlm. 100).

Berdasarkan pemaparan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengungkap kritik sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana kritik sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskripsi analisis. Menurut Sugiyono (2009, hlm. 29) metode deskripsi analisis merupakan salah satu metode untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, penelitian jenis ini cocok dipilih karena peneliti akan mencari, menguraikan, dan mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam larik puisi. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra berdasarkan teori Wallek dan Warren untuk mendeskripsikan kritik sosial dalam kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang yang digambarkan oleh pengarang.

Sumber data ini adalah puisi-puisi dalam kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang yang diterbitkan oleh JBS pada bulan Juli tahun 2020. Buku tersebut terdiri atas 80 halaman utama. *Negeri Terluka* merupakan kumpulan puisi yang terdiri atas 41 puisi. Buku tersebut ditulis Saut Situmorang sejak tahun 1987 hingga 2015. Dari buku tersebut, terdapat delapan puisi yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun delapan puisi tersebut, yaitu (1) “potret Kota Medan”; (2) “banyak orang menebang hutan”; (3) “HARTO” (4) “aku adalah mayat”; (5) “PERINGATAN RAKYAT”; (6) “Negeri Terluka”; (7) “Matamu”; (8) dan “Apakah Kita Harus Diam Saja?!”. Data-data dari puisi-puisi tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Data berupa larik-larik puisi yang sudah diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan adalah tabel klasifikasi kritik sosial.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang mengandung banyak permasalahan sosial yang diungkap sebagai kritik sosial. Kedelapan puisi yang dijadikan sumber data mengandung kritik sosial berupa kritik sosial masalah lingkungan hidup, masalah birokrasi, masalah kependudukan, masalah pelanggaran norma-norma masyarakat, masalah kejahatan, dan masalah kemiskinan. Dengan demikian, terdapat enam kritik sosial yang ditemukan.

### **Kritik Sosial Masalah Lingkungan Hidup**

Masalah besar dalam lingkungan hidup adalah pencemaran fisik, biologis, maupun sosial karena merugikan manusia. Contoh dari pencemaran adalah pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran sosial. Dengan demikian, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat manusia. Masalah lingkungan

hidup tersebut ditemukan dalam puisi “potret Kota Medan”, “banyak orang menebang hutan”, “Negeri Terluca”, dan “Matamu”.

Permasalahan lingkungan yang diangkat dalam puisi “potret Kota Medan” dapat dilihat dari penggunaan larik */rumah rumah berjejer jejer//di pinggir pinggir jalan jalan kotal/ dan /debu debu & asap asap/ /pabrik pabrik & knalpot knalpot/*. Debu, asap, pabrik, dan knalpot memberikan gambaran adanya polusi udara. Dikaitkan dengan judul, dapat disimpulkan bahwa terjadi polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Medan. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2007—Kota Medan terdapat sebelas isu-isu utama lingkungan hidup, salah satunya pencemaran udara. Pencemaran udara di Kota Medan masih terjadi akibat beberapa faktor, yaitu cerobong asap pabrik, asap dari kendaraan bermotor, kebakaran, dan lain sebagainya (Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Medan-Sumatera Utara, 2007, hlm. 6). Sementara itu, dalam puisi “banyak orang menebang hutan” mengungkapkan permasalahan penebangan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Hal ini dapat dilihat secara eksplisit melalui judul puisi, yaitu “banyak orang menebang pohon”. Secara khusus, puisi tersebut membahas penebangan pohon di daerah Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut dapat dilihat dari larik */banyak orang menebang hutan di pedalaman Sumatera-Kalimantan/*. Berdasarkan data yang dirilis oleh organisasi lingkungan WWF Indonesia, lebih dari 80% hutan Sumatera dan Kalimantan termasuk dalam 11 wilayah yang berkontribusi dalam deforestasi hingga tahun 2030 (BBC News, 2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *deforestasi* adalah penebangan hutan. Kemudian, dalam puisi juga diceritakan bagaimana proses setelah pohon ditebang, yaitu diikat dan dihanyutkan di sungai. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan larik */di sungai kayu kayu itu diikat satu satu/*. Kayu-kayu diikat di sungai tersebut sebagai proses pemindahan batang-batang kayu hasil penebangan. Selain masalah penebangan liar, puisi tersebut juga menyinggung masalah burung enggang. Burung enggang atau yang dikenal dengan burung rangkong adalah burung yang memiliki bagian penting dalam masyarakat Suku Dayak. Melalui bait */burung burung enggang yang sejak pagi terbang//ke hutan sebrang//tak mengerti ke mana istri istri mereka menghilang//burung burung enggang yang baru pulang dari//hutan sebrang//kini ribut berenggan enggang sepanjang petang/* digambarkan bahwa akibat penebangan hutan, burung enggang mencari istrinya yang menghilang dan tidak ditemukan hingga membuat burung enggang terus berenggang-enggang. Diwakilkan oleh gambaran istri burung enggang yang tidak ada, burung enggang perlahan punah. Hal tersebut disebabkan pohon-pohon besar yang merupakan rumah bagi burung enggang ditebangi terus menerus sehingga habitat burung enggang hilang. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Gunung Betung, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Di Gunung Betung ditemukan adanya ancaman terhadap habitat burung enggang yang banyak diakibatkan aktivitas manusia, yaitu perusakan hutan (Aryanto, dkk. 2016. hlm. 14).

Masalah lingkungan dalam puisi “Negeri Terluca” adalah dampak alih fungsi lahan terhadap ketersediaan pangan. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian. Namun, setiap tahunnya lahan pertanian semakin sempit atau berkurang. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian. Meskipun alih fungsi lahan merupakan hal yang wajar, tetapi menjadi masalah jika hal tersebut terjadi pada lahan pertanian yang masih produktif atau masih menghasilkan produk pertanian yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pembangunan kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, atau kawasan industri di atas lahan produktif. Dengan adanya alih fungsi tersebut, tentu menurunkan produksi padi nasional.

Penyempitan lahan juga terjadi pada hutan. Hutan di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan jumlah. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu degradasi dan deforestasi. Menurut Wibowo dan Gintings (2010, hlm. 67) degradasi dan deforestasi terjadi karena beberapa faktor, di antaranya (1) kebakaran dan perambahan hutan; (2) *illegal logging* dan *illegal trading* karena permintaan kayu dan hasil hutan yang tinggi di berbagai pasar, baik lokal, nasional, maupun global; (3) konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan hal lainnya; (4) digunakannya kawasan hutan di luar sektor kehutanan; (5) cara panen hasil hutan yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL). Dampak terjadinya degradasi adalah munculnya krisis ketersediaan pangan akibat berbagai bencana ekologis yang muncul (Pasandaran, dkk., 2011, hlm. 34).

Keadaan-keadaan tersebut digambarkan oleh bait */Orang bilang tanah kita tanah surga//Tongkat kayu dan batu jadi tanaman karena tak ada lagi hutan dan sawah/* dalam puisi “Negeri Terluca”. Indonesia bukan tanah yang subur hingga tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman yang dapat menghidupi masyarakat, melainkan karena lahan sawah dan hutan sudah menyempit sehingga tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman yang seharusnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah yang disampaikan puisi “Matamu” adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Hutan yang dialihfungsikan adalah hutan lahan gambut. Tanaman sawit ramai dikembangkan di Indonesia tahun 2009 sejumlah 7,8 juta hektar (Wibowo, 2010, hlm. 251). Hal tersebut disebabkan tingginya nilai ekonomi tanaman kelapa sawit sebagai sumber devisa, pendapatan, dan membuka lapangan kerja (Wibowo, 2010, hlm. 252). Namun, di balik berbagai tingginya nilai tanaman tersebut, terdapat harga mahal yang harus dikorbankan, yaitu (1) pembukaan lahan hutan yang masih menggunakan cara tidak tepat, yaitu dengan cara membakar; (2) pemilik lahan kehilangan lahan garapan karena harus melepas lahan untuk dijadikan perkebunan sawit sehingga mereka harus menggunakan tenaga sebagai pekerja di perusahaan sawit untuk bertahan hidup; (3) buruh kelapa sawit tidak sejahtera karena upah yang rendah dan target kerja yang tinggi dengan bekerja tanpa alat dan tidak ada jaminan keselamatan (Nugroho, 2017, hlm. 25—28). Selain itu, andil alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit menyumbang perubahan iklim dunia. Hal ini disebabkan lahan gambut di Indonesia terbesar ke-4 di dunia yang membuat gambut

memiliki peran sangat penting dalam pengamanan perubahan iklim global. Dengan demikian, apabila terjadi kebakaran lahan gambut atau terdegradasi, akan teremisi beragam jenis gas rumah kaca hingga mengubah iklim global (Wibowo, 2010, hlm. 253—254). Selain itu, hutan memiliki andil sangat besar dalam pembuatan kertas. Pertumbuhan industri percetakan di Indonesia sangat pesat. Namun, semakin pesat industri tersebut, semakin mengkhawatirkan keadaan hutan di Indonesia karena bahan utama industri buku adalah kertas. Kertas dihasilkan oleh kayu berserat tinggi dengan cara menebang pohon. Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dampak negatif tersebut antara lain kerusakan habitat alami, kepunahan flora dan fauna khas Indonesia yang langka, pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah pengolahan kertas yang sulit terurai, dan gas rumah kaca yang dihasilkan (Sutanto, 2019, hlm. 16). Keadaan tersebut disampaikan oleh puisi “Matamu” melalui larik */Matamu adalah hutan hutan nenek moyang yang ditebang jadi perkebunan sawit dan pabrik pupuk kertas/*.

Selain alih lahan fungsi hutan sebagai hutan sawit, terdapat pula permasalahan pertambangan emas dan tembaga. Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pertambangan yang membuat para investor asing tertarik. Salah satu perusahaan terbesar adalah PT Freeport Indonesia yang merupakan afiliasi dari Freeport McMoran Copper & Gold Inc. PT tersebut beroperasi di daerah dataran tinggi Tembaga, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, Indonesia. Selain PT Freeport Indonesia, masih terdapat beberapa perusahaan raksasa di sektor pertambangan emas (Yoesry, 2019, hlm. 161). Adanya pertambangan emas dan tembaga yang diambil dari gunung-gunung di Indonesia digambarkan oleh larik */Matamu adalah gunung gunung suci keramat yang dicincang jadi emas dan tembaga/*. Penggunaan frasa *gunung-gunung suci keramat* mewakili gunung-gunung yang dijadikan sumber emas dan tembaga tersebut adalah gunung-gunung yang sebelumnya tidak terjamah. Namun, dengan dilakukan penambangan, gunung-gunung tersebut secara perlahan hancur akibat pengerukan berpuluh-puluh tahun sehingga tepat penggunaan kata *dicincang* dalam larik tersebut.

Masalah lain adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik semen. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan alih fungsi lahan menjadi pabrik semen tersebut. Misalnya, kasus pembangunan PT Semen Indonesia di Tuban yang ditolak oleh para petani di beberapa desa di empat kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hal tersebut terjadi karena terdapat dampak-dampak negatif akibat adanya PT Semen Indonesia, yaitu (1) masyarakat petani termarginalkan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan industrialisasi; (2) terdapat kesenjangan ekonomi antara elite desa yang mendapat keuntungan dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat kehilangan lahan sehingga menjadi pengangguran; (3) keadaan sumber daya alam menjadi langka karena dieksploitasi dan kerusakan lingkungan berupa debu yang menyebabkan masyarakat sesak dada, adanya banjir, dan kerusakan rumah akibat pengeboran; (4) dan masyarakat terdampak hanya menjadi buruh kasar di pabrik semen tersebut, bahkan posisi tersebut pun tidak diprioritaskan (Afifah & Harianto, 2014, hlm. 4—5). Kasus serupa berulang di Kabupaten Rembang. PT Semen Indonesia yang sudah mulai menyadari bahwa dia membutuhkan pasokan bahan baku agar tetap bisa menghasilkan produk dan terus menguasai pangsa pasar semen nasional mencari lahan baru dan akhirnya menemukan areal di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Keadaan tersebut disampaikan dan digambarkan oleh larik */Matamu adalah lahan subur gembur yang dicuri jadi pabrik pabrik semen/*. Penggunaan frasa *lahan subur gembur* menggambarkan keadaan lahan pertanian yang direbut dari para pemilik lahan. Lahan-lahan tersebut adalah lahan produktif yang masih digunakan sebagai lahan pertanian untuk mata pencaharian. Dengan demikian, lahan tersebut merupakan lahan yang subur. Kemudian, penggunaan kata *dicuri* tepat untuk menggambarkan pelepasan lahan secara paksa dari para petani. Hal ini dibuktikan dari penolakan keras petani terhadap pembangunan pabrik tersebut. Bahkan, petani mencoba untuk mempertahankan lahan miliknya dan lingkungannya dengan mengadakan demonstrasi serta pemboikotan jalur angkut sebagai bentuk penolakan. Selain itu, kata ulang yang menyatakan jumlah pada kata *pabrik-pabrik* menjelaskan bahkan kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada sebuah pabrik, tetapi beberapa pabrik.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, larik */Matamu adalah danau biru berkabut yang disulap jadi pembuangan kotoran babi raksasa/* menyampaikan masalah pencemaran air di danau-danau yang ada di Indonesia akibat limbah. Salah satunya Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa faktor yang menyebabkan Danau Toba tercemar adalah (1) rendahnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pencemaran lingkungan hidup; (2) pemberian pakan secara berlebihan oleh pengusaha budidaya ikan keramba jaring apung; (3) pembuangan kotoran, sisa pakan, dan limbah cair oleh PT Allegrido yang membudidayakan babi ke sungai dan langsung mengalir ke danau (Sinurat, 2019, hlm. 45—46). Dengan demikian, penggunaan frasa *danau biru berkabut* mewakili danau-danau berair biru karena masih bersih. Sementara itu, maksud */disulap jadi pembuangan kotoran babi raksasa/* adalah dijadikan tempat pembuangan limbah oleh masyarakat.

Masalah selanjutnya yang diangkat dalam puisi adalah perkembangan desa wisata yang digambarkan oleh larik */Matamu adalah kampung damai tenteram yang dikutuk jadi hotel hotel bernama asing/*. Tidak dapat dimungkiri, di beberapa tahun terakhir pariwisata menjadi sektor unggul dalam memperoleh pemasukan dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan keunggulan tersebut, pariwisata merambah ke tempat-tempat yang masih asri dengan kearifan lokal yang tinggi sehingga muncul *cultural tourism* (Hasanah, 2019, hlm. 45). Tempat-tempat dengan kebudayaan kental dan keadaan lingkungan sosial yang masih tenteram menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk menunjang wisatawan datang, diadakan fasilitas-fasilitas yang membuat wisatawan nyaman.

Misalnya, hotel, akses transportasi, dan rumah makan. Salah satu kampung wisata adalah wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah.

### **Kritik Sosial Masalah Birokrasi**

Kritik sosial masalah birokrasi adalah kritik terhadap keadaan terkait dengan kepemimpinan. Masalah birokrasi tersebut ditemukan dalam puisi “HARTO”, “Negeri Terluka”, dan “Apakah Kita Harus Diam Saja?”.

Kritik sosial dalam puisi “HARTO” berisi kritik terhadap pemerintahan yang dipimpin Suharto sebagai presiden kedua RI. Hal ini terlihat dalam penggunaan judul yang secara eksplisit menggunakan nama Suharto. Sebagaimana disebut dalam puisi “HARTO” bait pertama, yaitu */Diktator tua yang gila/*, Suharto memang dikenal sebagai pemimpin yang otoriter. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan yang dibuat, yaitu (1) pembatasan hak berpendapat dilakukan dengan hanya tiga partai yang diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu, yaitu partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan segala aturan yang mengikat; (2) PDI dan PP tidak memiliki kebebasan karena peran politik yang dibatasi; (3) memberikan Golkar kekuasaan lebih sebagai kendaraan politik dan memastikan masyarakat tidak dapat dimobilisasi partai-partai politik; (4) dan menempatkan DPR dan MPR sebagai lembaga politik yang berada di bawah pengawasannya secara penuh. Kemudian, lirik */Jahat licik tamak serakah/* dan */Tak peduli apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia/* merupakan gambaran keserakahan elite politik pada masa pemerintahan Suharto. Berbagai proyek ditunggangi oleh pemimpin-pemimpin dalam ajang pemilu sehingga proses pembangunan tidak berkualitas karena dana telah habis dimakan oleh mereka (Hanugrah & Hardi, 2019, hlm. 382). Dengan demikian, di masa pemerintahan Suharto penyelewengan kekuasaan sudah biasa terjadi. Penggunaan frasa *pesta gelak tawa* dalam lirik */Pesta gelak tawa dari pelosok negeri//Saat mengusir engkau nanti/* mewakili kebahagiaan rakyat Indonesia saat berhasil membuat Suharto turun mundur dari jabatannya. Keadaan tersebut dikuatkan dengan lirik */Berjuta kepala terangkat legal/* yang menggambarkan kebebasan.

Dalam puisi “Negeri Terluka”, kritik sosial ditujukan pada elite politik dan pengusaha yang mendatangkan dampak negatif terhadap masyarakat. Kata *dusta* pada bait pertama, yaitu */Bahkan sejak kanak kanak pun//kita kena dusta/* bermakna janji-janji yang diberikan oleh para penguasa hanya sebuah kebohongan. Kata *para pelawak* dalam bait */Dan para pelawak ramai ramai//ikut menyanyikan dusta itu/* bermakna para pejabat, elite politik, konglomerat, dan pihak-pihak yang diuntungkan sebagai bentuk visualisasi sosok yang menghibur masyarakat sehingga masalah-masalah yang ada tidak terlihat seperti yang digambarkan lirik */untuk menutupi bau busuk dari luka luka kita:/.* Selain itu, kekayaan Indonesia dikuasai oleh beberapa golongan. Hal tersebut diakibatkan adanya ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Di tahun 2014, World Bank mengeluarkan sebuah fakta bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 55,5% persen kekayaan negara Indonesia (REP-HUMAS SETDAPROV JABAR, 2016). Data tersebut menguatkan ketimpangan yang terjadi. Kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang tersebut adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan, salah satunya politikus. Dengan adanya kedekatan kekuasaan dengan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, para politikus berusaha untuk mendapatkan posisi jabatan agar dapat bebas menguasai kekayaan tersebut. Bahkan, berlaku politik dinasti agar kekayaan tersebut tetap terjaga. Keadaan tersebut disampaikan oleh bait */Orang bilang tanah kita tanah surga//Politikus dan ulama benar benar menikmati/*. Tidak hanya itu, aparat keamanan yang memiliki kewajiban untuk mengayomi dan melindungi masyarakat banyak yang ditunggangi oleh orang-orang tertentu, khususnya pengusaha. Misalnya, kasus 16 Purnawirawan TNI-Polri yang terlibat bisnis pertambangan dan menempati jabatan dalam perusahaan tambang (Tanjung & Sari, 2021). Kemudian, kegiatan tambang ilegal di berbagai daerah juga didukung oleh oknum aparat keamanan sehingga penambangan ilegal berjalan lancar dan oknum aparat setempat pun mendapat keuntungan (Rachman, 2019). Padahal, bisnis pertambangan hanya menguntungkan pengusaha dan tindakan tersebut melanggar peraturan yang ada, yaitu dilarang memberikan penanganan terhadap perusahaan yang bukan milik negara. Keadaan tersebut tergambar pada bait */Orang bilang kita tanah surga//Tentara polisi kerjasama dengan preman bela pengusaha/*.

Permasalahan juga muncul akibat penindasan terhadap buruh dan petani. Hingga saat ini, masih banyak penindasan baik di dunia usaha industri, jasa, dan pertanian, baik di desa maupun di kota. Bahkan, menurut Henry Saragih selaku Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, kondisi buruh dan petani bermasalah dalam hal kemiskinan dan kesejahteraan (Serikat Petani Indonesia, 2021). Hal tersebut sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) 2020 bahwa di tahun 2019 mencatat sebanyak 12,60% merupakan penduduk miskin perdesaan, sedangkan 6,56% di perkotaan (Yacoub dan Mutiaradina, 2020, hlm. 92). BPS juga mencatat sebanyak 49,41% rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang bersumber pencaharian utama berupa pertanian (Yacoub dan Mutiaradina, 2020, hlm. 92). Faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang sejak 2010 berada di 100—105 yang artinya masih berada di batas bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu sebesar 115—120 (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, TT).

Dikaitkan dengan tahun yang tercantum dalam puisi, yaitu Desember 2014 terdapat kebijakan yang memberatkan petani. Kebijakan tersebut adalah Keputusan MA No. 70 Tahun 2014 yang menyatakan semua produk hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN sebesar 10%, baik bagi barang impor maupun lokal. Hal tersebut membuat produk pertanian Indonesia semakin kalah bersaing dengan produk ekspor. Pemberlakuan PPN 10% tersebut dilakukan pada 22 Juli 2014 atau lima

bulan sebelum puisi “Negeri Terluka” ditulis. Berkaitan dengan buruh, buruh di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Dihubungkan dengan tahun penulisan puisi, yaitu tahun 2014, buruh masih mendapatkan upah minimum yang rendah. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2014 hanya sebesar 20% sehingga tidak sesuai dengan nasib buruh (Fahriyadi, 2013). Selain itu, di tahun 2014 terjadi rapat konsolidasi lanjutan yang mengungkap permasalahan-permasalahan buruh, pegawai, dan karyawan baik di sektor formal maupun informal, antara lain pengadaan hubungan industrial, jaminan pensiun, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan buruh perempuan yang meliputi kekerasan seksual, hak cuti, fasilitas kerja, kesehatan reproduksi serta diskriminasi, *outsourcing* serta upah layak. Dengan demikian, buruh selama ini belum mendapatkan hak yang maksimal sesuai dengan yang seharusnya. Masih terdapat banyak kebijakan yang merugikan buruh.

Berdasarkan penjabaran berkaitan dengan tani dan buruh tersebut, puisi “Negeri Terluka” menyampaikan melalui bait */Orang bilang tanah kita tanah surga//Butuh dan tani tak lebih berharga dibandingkan asap pabrik dan pestisida/*. Dengan demikian, bait tersebut mewakili permasalahan-permasalahan yang ada. Penggunaan frasa *asap pabrik* dan kata *pestisida* yang digambarkan lebih berharga daripada nasib buruh dan tani menjelaskan bahwa buruh dan tani dikorbankan untuk kepentingan tertentu.

Pada puisi “Apakah Kita Harus Diam Saja?!” kritik sosial ditujukan pada birokrasi yang ada. Kebebasan berpendapat dibatasi, meskipun banyak penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Keadaan tersebut digambarkan oleh lirik */Ketika kekuasaan yang lalim menghina kebenaran//Ketika ketidakadilan menindas dan membungkam perlawanan/* disambung dengan pertanyaan retorik */Apakah kita harus diam saja?/* dan */Apakah kita harus menganggapnya tak ada?/*. Melalui puisi tersebut, rakyat diajak untuk berani berbicara dan melawan keadaan yang ada. Hal tersebut terlihat jelas dalam lirik */Kita harus membuat rakyat marah pada kekuasaan yang alim//Kita harus membuat rakyat marah pada ketidakadilan negara/*. Seruan tersebut terasa di sepanjang puisi. Selain itu, lirik */Rakyat tidak bisa makan dibidang karena malas atau terlalu banyak makan//Rakyat marah karena tidak bisa makan dibidang berkhianat/* menggambarkan bahwa pemerintah seakan lepas tangan dengan kesejahteraan masyarakat.

## **Kritik Sosial Masalah Kependudukan**

Kritik sosial masalah kependudukan adalah kritik terhadap tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Masalah kependudukan ditemukan dalam puisi “aku adalah mayat” dan “Matamu”.

Kritik sosial dalam puisi “aku adalah mayat” berkaitan dengan masyarakat yang termarginalkan. Masyarakat marginal adalah orang-orang yang terpinggirkan karena sebuah tatanan masyarakat, yaitu ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya yang tidak mendukung. Artinya, masyarakat marginal merupakan masyarakat yang tersingkirkan atau terbuang dari kehidupan masyarakat yang semestinya. Misalnya, buruh, pedagang kecil, orang miskin perkotaan, pemulung, pengemis, anak jalanan, dan orang-orang yang berpenghasilan kurang atau tidak memiliki penghasilan. Isi puisi tersebut menggambarkan masyarakat marginal yang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat umum. Tidak ada cukup rasa empati dari masyarakat umum. Hal tersebut digambarkan oleh lirik */aku adalah laki-laki itu yang kemarin//berpapasan denganmu tapi tak kau hirau//aku adalah laki laki itu yang berteduh di bawah//pohon di pinggir jalan waktu turun hujan//dan sebuah mercedes mencipratkan air lumpur//ke baju dan celanaku/*. Puncak dari pengabaian terhadap masyarakat marginal digambarkan mayat yang terapung di sungai dan membusuk melalui lirik */aku adalah maya yang terapung di sungai//di samping rumahmu//aku adalah mayat membusuk yang terapung//tersangkut bambu di sungai dekat rumahmu//aku adalah mayat busuk tak berbaju//yang mengapung di sungai pagi itu// dan /aku adalah bau busuk yang mengganggu tidurmu sepanjang malam itu/*. Tidak hanya itu, kehidupan masyarakat marginal tidak menemui titik tenang karena kehidupannya terus dikejar-kejar oleh pihak berwajib dan dinas terkait. Penggambaran tersebut terlihat di lirik */aku adalah laki laki itu yang berjalan terburu buru//tiap kali polisi memapasi//kami adalah wajah wajah itu yang tertunduk//di atas truk diangkat seperti sampah busuk/* dan */kami adalah wajah wajah itu yang menatap kosong//waktu rumah tepas kami kau bulldozer/*.

Dalam puisi “Matamu” yang dibahas adalah banjir dan kemacetan lalu lintas yang menjadi permasalahan tidak kunjung menemui penyelesaiannya. Kedua masalah tersebut menjadi masalah khas Indonesia, terlebih di kota-kota besar. Misalnya, Jakarta. Bahkan, Joko Widodo selaku Presiden RI menyatakan bahwa Jakarta hanya memiliki dua permasalahan, yaitu banjir dan macet. Hal tersebut tentu tidak mungkin tanpa faktor penyebab. Faktor penyebab banjir di Jakarta adalah (1) tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta; (2) tingginya penggunaan kendaraan sepeda motor dua roda di Jakarta; (3) tidak sebanding antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan; (4) pengguna jalan yang tidak disiplin menaati peraturan lalu lintas; (5) adanya pembangunan infrastruktur (Sitanggang dan Saribanon, 2018, hlm. 293—295). Sementara itu, faktor penyebab terjadinya banjir jika dilihat dari ilmu geologi dan geomorfologi adalah Jakarta memang daerah banjir karena terdapat tiga belas sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta yang juga sebagai akses aliran air permukaan bersumber dari curah hujan (Harsoyo, 2013, hlm. 43). Selain itu, banjir juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan; pola hidup bersih masyarakat yang belum terbangun sehingga membuang sampah sembarangan; tidak adanya perencanaan drainase yang baik; tidak ada upaya pemeliharaan faktor yang menjadi penyeimbang lingkungan air; adanya penurunan muka tanah; dan curah hujan yang tinggi (Rahardjo, 2014, hlm. 205). Banjir juga disebabkan oleh tata guna lahan dan alih fungsi lahan (Eldi, 2020, hlm. 1061). Kedua masalah tersebut diungkapkan melalui

larik */Matamu adalah banjir dan kemacetan lalu lintas yang tak henti menghantui pagi dan malammu/*. Penggunaan kata *menghantui* menggambarkan bahwa pada kenyataannya masyarakat Indonesia, terkhusus kota-kota besar harus selalu siap menghadapi kemacetan setiap saat. Berkaitan dengan banjir, masyarakat harus siap kapan pun banjir tiba-tiba datang. Baik itu malam atau pagi atau malam seperti frasa *pagi dan malammu*.

Masalah yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga terjadi ketika berhadapan dengan fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin tidak diprioritaskan. Bahkan, diabaikan karena tidak memiliki uang. Hal yang sangat disayangkan pada kasus seperti itu adalah terjadi di fasilitas kesehatan milik pemerintah, misalnya RSUD. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Deva anak pemulung yang ditolak berobat di RSUD Margono Soekarjo. Keadaan tersebut terjadi karena orang tua Deva membawa ke RSUD dengan menggunakan Jamkesmas, tetapi ditolak karena harus membayar untuk rawat umum. Sementara itu, orang tua Deva tidak memiliki uang. Akhirnya, keluarga tersebut diminta pulang oleh rumah sakit (Iswinaro, 2015). Kejadian yang dirasakan oleh Deva hanya satu kejadian dari banyaknya kejadian di berbagai daerah. Oleh sebab itu, larik */Matamu adalah orang miskin yang ditolak rumah sakit di seluruh negerimu/* menggunakan keterangan *ditolak rumah sakit di seluruh negerimu* karena terjadinya bukan hanya di satu rumah sakit.

### **Kritik Masalah Pelanggaran Norma-norma Masyarakat**

Kritik sosial masalah norma-norma masyarakat adalah kritik sosial terhadap pelanggaran norma atau norma yang menyimpang di masyarakat. Masalah pelanggaran norma-norma masyarakat ditemukan dalam puisi “aku adalah mayat” dan “Matamu”.

Dalam puisi “aku adalah mayat” pelanggaran norma-norma masyarakat adalah adanya tindakan pelacuran. Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat marginal adalah wanita-wanita yang masuk ke dunia malam, yaitu menjadi WTS (wanita tuna susila). Penggambaran tersebut terlihat di larik */aku didekati seorang laki laki yang pandai berkata kata//aku adalah perempuan itu yang Cuma punya//sepuluh ribu di saku//aku berdiri di trotoar jalan ditutupi malam//menunggumu//aku adalah perempuan itu yang bermimpi sambil merias diri/*.

Dalam puisi “Matamu”, larik */Matamu adalah polisi yang menembaki para mahasiswa yang sedang demo sambil memaki mereka anarkis dan teroris/* menggambarkan anarkis dan tidak bersahabatnya aparat kepolisian saat demo yang digelar oleh mahasiswa berlangsung. Keadaan demikian hingga saat ini masih terjadi. Kejadian yang sangat diingat adalah ketika demo dilakukan oleh mahasiswa Trisakti untuk menurunkan Suharto hingga polisi melepaskan tembakan dan menewaskan tujuh mahasiswa (Sapari dan Kurniati, 2008, hlm. 130). Memperkuat hal tersebut, larik */Matamu adalah preman preman berjubah memukuli mahasiswa yang sedang diskusi buku sambil memaki mereka Komunis/* menggambarkan bahwa mahasiswa yang hendak menyampaikan pendapat dan aspirasi menggunakan pengetahuan dari berbagai teori yang diwakilkan dengan frasa *diskusi buku* tidak mendapat sambutan baik oleh *preman-preman berjubah* yang artinya polisi atau aparat keamanan. Penggunaan istilah *preman-preman berjubah* menggambarkan polisi yang sifatnya seperti preman hanya saja menggunakan seragam. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di Indonesia belum dilindungi dengan baik. Kasus lain adalah kasus nenek Asyani di Kabupaten Situbondo. Sebagaimana yang digambarkan oleh larik */Matamu adalah nenek tua yang dipenjarakan karena mau memakai ranting kayu dari halaman rumahnya sendiri untuk kayu api/*, nenek tua bernama Asyani yang berumur 63 tahun didakwa mencuri tujuh batang pohon jati yang diklaim milik Perhutani di lingkungan rumahnya (Sholahudin, 2016, hlm. 32). Sementara itu, menurut kesaksian Asyani dan istri Kepala Desa Jatibanteng, kayu tersebut ditebang dari lahan milik Asyani dan suaminya sendiri. Meskipun demikian, proses pengadilan tetap berjalan hingga majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp500 juta (Sholahudin, 2016, hlm. 32). Dengan beredarnya berita berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat menganggap perlakuan hukum di Indonesia berlebihan. Apalagi jika berhubungan dengan rakyat kecil atau rakyat miskin. Hal ini dibandingkan dengan masalah para pejabat dan kaula elite yang melakukan pencurian sangat besar lolos dari hukum.

### **Kritik Masalah Kejahatan**

Kejahatan menurut sudut pandang sosiologi (Kusumah, 1988, hlm. 40—42) adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Masalah kejahatan ditemukan dalam puisi “Matamu” dan “PERINGATAN RAKYAT”.

Kejahatan yang terdapat dalam puisi “PERINGATAN RAKYAT” adalah kejahatan *white collar* berupa korupsi. Berdasarkan puisi “PERINGATAN RAKYAT”, disampaikan dampak-dampak yang diakibatkan kegiatan korupsi, yaitu kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Meskipun demikian, dampak-dampak yang disebutkan tersebut hanya mewakili dampak yang terjadi sebenarnya. Berdasarkan modul Dampak Sosial Korupsi, korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi menurunkan tingkat investasi, korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan kelembagaan yang buruk, korupsi menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan, dan korupsi meningkatkan kemiskinan (Pradiptyo, 2016, hlm. 23—27). Dikaitkan dengan dampak yang disebutkan dalam puisi, hal tersebut selaras. Misalnya, dampak ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi tingkat korupsi di Indonesia, maka pendapatan per kapita menjadi semakin rendah dan pembelanjaan kesehatan publik juga semakin

rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan fasilitas kesehatan tidak memadai sehingga berdampak kepada masyarakat. Dampak tingkat kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan pun akan semakin tinggi saat korupsi di Indonesia tinggi. Kemiskinan yang ada akan memengaruhi lini kehidupan. Dampak dari kemiskinan tersebut diwakili oleh larik /KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN/. Dengan demikian, secara tidak langsung disampaikan bahwa korupsi yang ada membunuh masyarakat, baik secara langsung yang digambarkan dengan penyakit kanker, jantung, impotensi, atau menggagalkan calon masa depan bangsa dengan adanya gangguan di masa kehamilan dan janin.

Dalam puisi “Matamu” juga membahas korupsi. Banyaknya masalah korupsi di Indonesia membuat tingkat kasus korupsi tinggi. Meskipun demikian, KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi setidaknya cukup mampu untuk menangkap koruptor-koruptor yang meresahkan masyarakat. Meskipun demikian, para pejabat yang tertangkap masih dapat berdiri tegak dan tersenyum saat mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye. Bahkan, tanpa rasa bersalah mereka melambatkan tangan ke awak media yang meliput. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu tersangka kasus korupsi e-KTP, yaitu Setyo Novanto yang pada tanggal 22 Desember 2017 ditemui di gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan. Menurut Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, Indonesia belum memiliki budaya malu sehingga penggunaan baju tahanan khusus bagi koruptor gagal mempermalukan koruptor karena koruptor masih dapat tersenyum, melambatkan tangan, mengacungkan dua jempol jarinya, atau memberi salah saat disorot kamera televisi atau jepretan juru kamera (news.detik.com, 2013). Hal tersebut sesuai dengan yang digambarkan oleh larik /Matamu adalah pejabat negara yang tersenyum di televisi waktu ditangkap karena korupsi/.

### **Kritik Masalah Kemiskinan**

Kritik sosial masalah kemiskinan adalah kritik yang muncul akibat adanya ketidakberfungsian lembaga kemasyarakatan sehingga mengakibatkan kemiskinan. Masalah kemiskinan ditemukan dalam puisi “Matamu”.

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia di September 2020 sebesar 10,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2010 hingga September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal tersebut dilihat dari sisi jumlah dan persentase, kecuali pada empat waktu, yaitu September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kemiskinan tersebut disampaikan oleh frasa anak-anak yang menangis kelaparan. Dikaitkan dengan kata selanjutnya, yaitu tak punya uang untuk beli beras dan garam impor adalah bentuk sindiran terhadap kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dan garam. Hal tersebut diprotes oleh masyarakat karena Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Keadaan-keadaan tersebut diwakili oleh larik /Matamu adalah anak anak yang menangis kelaparan tak punya uang untuk beli beras dan garam impor/.

Selain itu, terdapat pula masalah BBM yang naik. Di Indonesia, naik turun BBM sudah sering terjadi. Meskipun demikian, masyarakat tidak siap dengan kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu pengeluaran rumah tangga yang akan membengkak akibat BBM yang naik dan memengaruhi kenaikan barang yang lain, misalnya bahan bangunan dan non logam akan naik juga; nilai tukar rupiah akan berubah; dan defisit anggaran pemerintah. Larik /Matamu adalah harga BBM yang terus naik tiap kali kau kendarai sepeda motor kreditanmu ke tempat kerja/ menyampaikan keresahan terhadap masalah tersebut.

Masalah terakhir berkaitan dengan kemiskinan adalah menjamurnya pasar modern menggantikan pasar tradisional. Meningkatnya pasar modern membuat pasar tradisional terancam punah. Berdasarkan hasil penelitian A.C. Nielsen yang dikutip oleh Rusham (2016, hlm. 155) pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 8% per tahun. Hal tersebut berdampak besar bagi pedagang kecil jika keadaan tersebut terus dibiarkan tanpa ada solusi yang tepat. Larik /Matamu adalah supermall dan supermarket yang menjamur menggantikan pasar pasar tradisional di seluruh negerimu yang miskin/ mewakili keadaan tersebut. Penggunaan keterangan di seluruh negerimu yang miskin sebagai bentuk penyadaran bahwa masih banyak masyarakat miskin bergantung pada pasar tradisional dibandingkan pasar modern.

### **SIMPULAN**

Kritik sosial dalam puisi berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berbagai masalah yang terjadi. Dengan adanya kritik sosial, sistem sosial dan proses masyarakat mampu dikontrol. Secara keseluruhan, hasil analisis kumpulan puisi *Negeri Terluka* karya Saut Situmorang memiliki perannya sendiri bagi pembaca. Saut Situmorang berusaha menyampaikan berbagai persoalan dan merangkumnya melalui puisi. Keresahan, kesedihan, kemarahan, dan emosi lain dihadirkan melalui larik-larik dalam puisi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kritik sosial dalam puisi-puisi tersebut berbeda-beda. Secara umum, terdapat enam kritik sosial yang disampaikan, yaitu masalah lingkungan hidup, masalah kemiskinan, kejahatan, pelanggaran norma-norma masyarakat, birokrasi, dan kependudukan.

### **REFERENSI**

Abrar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia. *UNISIA*, 34(17), 44—51.

- Afifah, W. N. & Harianto, S. (2014). Dampak Negatif Industri PT. Semen Indonesia terhadap Masyarakat Desa Temadang. *Paradigma*, 2(1), 1—7.
- Aryanto, A. S., dkk. (2016). Keberadaan Burung Rangkong (Bucerotidae) di Gunung Betung Tamana Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Syiva Lestari*, 4(2), 9—16. doi: <http://dx.doi.org/10.23960/jsl249-16>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik menjadi 10,19 Persen. [Online]. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- BBC News. (2015). Hutan Sumatera dan Kalimantan Sumbang Deforestasi Global. [Online]. Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/04/150428\\_sains\\_hutan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150428_sains_hutan)
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014) Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian. *SETJEN DPR-RI*. 111—119.
- Detiknews. (2013). Koruptor Cengar-Cengir Hanya Ada di Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2413900/koruptor-cengar-cengir-hanya-ada-di-indonesia>
- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan-Sumatera Utara. (2007). *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Medan Tahun 2007*. Medan: KLH-ESDM Kota Medan.
- Eldi. (2020). Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1057—1064.
- Endraswara, S. (2012). *Teori Pengkajian Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: UNY Press.
- Fahriyadi. (2013). Buruh Minta Ada Kenaikan 30%—40% untuk UMP 2014. [Online]. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-minta-ada-kenaikan-30-40-untuk-ump-2014>
- Hanugrah, S. N. & Hardi, E. (2019). Melihat Penyimpangan Politik Masa Orde Baru dari Kaca Mata Karya Sastra (Sebuah Studi Histografi). *Galanggang Sejarah*, 1(3), 375—393. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3514443>
- Harsanti, A. G. (2017). “Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Sastra”. Dalam Sukartama, dkk. (Penyunting), *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global* (hlm. 1—774). Jember: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Harsoyo, B. (2013). Mengulas Penyebab Banjir di Wilayah DKI Jakarta dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi, dan Morfometri Sungai. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 14(1), 37—43.
- Hasanah, R. (2019). Kearifan Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. *Deskovi*, 2(1), 45—52.
- Iswinaro, C. (2015). Pasien Miskin Anak Pemulung Ditolak Berobat di RSUD Purwokerto. [Online]. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pasien-miskin-anak-pemulung-ditolak-berobat-di-rsud-purwokerto.html>
- Kusumah, M. W. (1988). *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia.
- Nugroho, A. A. (2017). Ironi di Balik Kemewahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 24—30.
- Nurgiantoro, B. (2015). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasandaran, E., dkk. (2011). *Degradasi Sumber Daya Alam: Ancaman bagi Kemandirian Pangan Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Pradipto, R. (2016). *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK.
- Pradopo, R. D. (2018). *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachman, D. A. (2019). TNI-Polri Diminta Tindak Tegas Oknum Aparatnya yang Mendukung Tambang Ilegal. [Online]. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/15215131/tni-polri-diminta-tindak-tegas-oknum-aparatnya-yang-mendukung-tambang-ilegal>
- Rahardjo, P. N. (2014). 7 Penyebab Banjir di Wilayah Perkotaan yang Padat Penduduknya. *JAI*, 7(2), 205—213.
- Rahayu, M. P. (2017). *Analisis Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Thukul*. (Skripsi). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- REP-HUMAS SETDAPROV JABAR. (2016). 1% Orang Indonesia Kuasai 55% Kekayaan Negara. [Online]. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/17213/2016/05/01/1-Orang-Indonesia-Kuasai-55-Kekayaan-Negara>
- Rusham. (2016). Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan “Optimal”*, 10(2), 153—166.
- Sapari, A. & Kurniati, N. M. T. (2008). Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi. *Jurnal Psikologi*, 1(2), 129—135.
- Serikat Petani Indonesia. (2021). Hari Buruh 2021: Implementasi UNDROP untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Tani di Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://spi.or.id/hari-buruh-2021-implementasikan-undrop-untuk-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-buruh-tani-di-indonesia/>
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *Dimensi*, 9(1), 31—45.
- Sinurat, A. A. E. B. (2019). *Aspek Hukum Perlindungan Danau Toba dari Pencemaran Akibat Kegiatan Masyarakat di Sekitarnya*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sitanggang, R. & Saribanon, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 4(3), 289—296.

- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, S. M. (2019). Buku Digital sebagai Solusi Alternatif untuk Mengurangi Dampak Negatif Industri Buku Indonesia pada Lingkungan, *Dimensi*, 16(1), 13—28.
- Tanjung, E. & Sari, R. R. M. (2021). Jatam Ungkap 16 Purnawirawan TNI-Polri Terlibat Bisnis Pertambangan. [Online]. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/01/29/201840/jatam-ungkap-16-purnawirawan-tni-polri-terlibat-bisnis-pertambangan>
- Tarigan, H. G. (1984). *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Wellek, R. & Warren, A. (2016). *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo, A. & Gintings, A. (2010). *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Wibowo, A. (2010). Konversi Hutan menjadi Tanaman Kelapa Sawit pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim dan Kebijakan, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 7(4), 251—260.
- Yacoub, Y. & Mutiaradina, H. (2020). “Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia”. Dalam Kartika, M. (Penyunting), *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*. (hlm. 92—102). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- Yoesry, E. (2019). Divestasi PT Freeport Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 160—186. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1915>